



Risalah Kebijakan

Nomor 11, Oktober 2022



Mengatasi Masalah Penyediaan Buku Teks Kurikulum Merdeka



Ringkasan

Buku teks versi cetak masih menjadi pilihan bagi hampir seluruh sekolah. Sebagian besar sekolah telah menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka, meskipun di beberapa daerah seperti Maluku dan Papua, persentasenya masih cukup rendah. Hal ini terkait pula dengan belum meratanya informasi yang diketahui sekolah mengenai kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka dan penggunaan dana BOS/BOP untuk pembelian buku teks tersebut.

Sekolah-sekolah umumnya menganggarkan pembelian buku teks dengan menggunakan dana BOS, meskipun sebagian di antaranya menganggap bahwa dana BOS belum mencukupi, terutama untuk memenuhi rasio ketercukupan satu buku untuk setiap siswa. Muncul pula kekhawatiran bahwa buku teks Kurikulum Merdeka yang sudah dibeli dapat mubazir, karena masih mengacu pada Capaian Pembelajaran Tahun 2021 yang telah diubah di Tahun 2022. Hal ini terkait pula dengan miskonsepsi yang berkembang bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan buku teks, sehingga apabila terdapat perubahan CP, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di lapangan.

Beberapa strategi disarankan untuk mengatasi berbagai masalah di atas. *Pertama*, mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terkait kebutuhan buku teks dan mekanisme penyediaannya. *Kedua*, memastikan sekolah dapat memenuhi ketercukupan rasio buku teks untuk siswa melalui dana BOS maupun BOS/BOP daerah secara bertahap. *Ketiga*, meningkatkan pemahaman para guru terkait pemanfaatan buku teks yang ada dan penyesuaian dengan Capaian Pembelajaran yang baru. *Keempat*, menyiapkan strategi afirmatif penyediaan buku teks, terutama untuk daerah tertinggal/khusus. Dalam jangka pendek, dapat dipertimbangkan kebijakan penyediaan buku teks secara langsung ke sekolah untuk menjamin sekolah-sekolah di daerah tertinggal atau daerah khusus dapat memenuhi kebutuhan buku teks yang diperlukan. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mendorong munculnya penyedia lokal yang dapat memberikan harga wajar/terjangkau, serta pelibatan dinas pendidikan untuk memastikan penyediaan buku bagi sekolah.

Konteks

Dampak krisis pembelajaran yang memburuk selama pandemi COVID-19 menyebabkan hampir seluruh negara di dunia perlu menempuh beragam strategi untuk pemulihan pembelajaran. Di Indonesia, salah satu strategi pemulihan pembelajaran dilakukan dengan perubahan paradigma kurikulum melalui peluncuran Kurikulum Merdeka pada 11 Februari 2022. Di satu sisi, Kurikulum Merdeka disambut positif, dengan 142.663 satuan pendidikan di 510 kabupaten/kota mendaftar implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri. Namun, di sisi lain, tantangan utamanya adalah memastikan Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan baik oleh satuan pendidikan.

Ketersediaan buku teks pelajaran yang berkualitas menjadi hal penting yang menentukan kualitas pembelajaran khususnya ketika perubahan paradigma pendidikan terjadi di sebuah negara (Wahid, 2021; Strauss, 2018). Beberapa studi menemukan, buku teks masih dianggap sebagai alat kurikuler dan instruksional utama oleh para guru ketika terjadinya perubahan kurikulum (Janko & Peskova, 2017; Oates, 2014). Kurangnya penguasaan pedagogis menjadi salah satu alasan mengapa guru masih sangat bergantung pada buku teks ketika mengajar. Pada praktiknya, kondisi ini dimaknai bahwa ketersediaan buku teks berpengaruh besar pada pelaksanaan kurikulum. Berkaca pada pengalaman perubahan Kurikulum 2013, permasalahan penyediaan buku teks sering kali berpotensi menghambat pelaksanaan pembelajaran di sekolah (Rachmawan, 2014; Afifah, 2013; Hayati, 2014; Telaumbanua, 2014). Oleh karena itu, memastikan ketersediaan buku teks pelajaran pada satuan pendidikan yang akan mengimplementasi perubahan menjadi hal yang krusial.

Penyediaan buku teks pelajaran diatur melalui mekanisme pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOS/BOP) Kesetaraan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, besaran persentase anggaran penyediaan buku saat ini dibuat lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam praktiknya, fleksibilitas yang diberikan kepada sekolah tidak serta merta menjadikan sekolah siap menyediakan buku teks pelajaran secara mandiri, khususnya sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Penerbitan dan penyediaan buku teks pelajaran khususnya di wilayah terpencil sering kali mengalami kendala dan keterbatasan karena kondisi geografis dan masalah teknis lain (Altbach, 2010; Fadhillah, 2017).

Untuk memberikan gambaran persiapan satuan pendidikan dalam penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP melakukan studi Pemanfaatan Dana BOS/BOP Reguler untuk Pemenuhan Buku Teks Kurikulum Merdeka di Daerah Khusus. Studi dilakukan melalui survei telepon kepada kepala satuan pendidikan pendaftar IKM pada tahap kesiapan Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi, serta diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan perwakilan dinas pendidikan dan kepala sekolah/satuan pendidikan pendaftar IKM, penerbit, ekspedisi, dan Pusat Perbukuan Kemendikbudristek. Studi dilakukan pada 7 - 15 Juni 2022. Satuan pendidikan yang disurvei dipilih menggunakan metode sampel acak pada kabupaten/kota yang memiliki sekolah di daerah khusus, mengacu pada Keputusan Mendikbudristek Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus berdasarkan Kondisi Geografis. Survei direspons oleh 487 kepala satuan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan non formal.

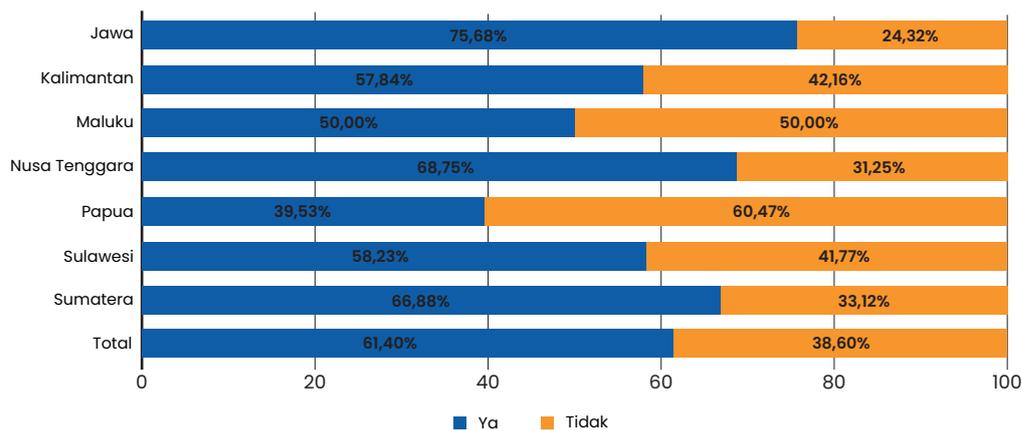
Simpulan #1: Buku cetak masih menjadi pilihan utama. Sebagian besar sekolah yang mendaftar IKM telah menganggarkan pembelian buku teks tersebut, kecuali di Maluku dan Papua persentasenya masih cukup rendah.

Penggunaan buku teks dalam pembelajaran memberikan dampak baik pada siswa karena mendorong pemahaman lebih mendalam terkait materi pelajaran, dan siswa cenderung lebih mengingat informasi yang didapatkan dari sumber cetak (Oates, 2014; Alexander & Singer, 2017). Hal ini terkonfirmasi melalui jawaban survei sebagian besar responden kepala satuan pendidikan (93,22%) yang menyatakan bahwa sekolah lebih memilih buku

cetak sebagai perangkat pembelajaran dibandingkan buku digital. Beberapa alasan preferensi tersebut adalah karena buku cetak dianggap lebih mudah digunakan dan lebih lengkap, lebih mudah dipahami karena terbiasa digunakan, serta adanya keterbatasan sarana prasarana di daerah untuk menggunakan buku digital, sehingga penggunaan buku cetak dianggap lebih efektif dalam pembelajaran.

“Buku digital membebani orang tua siswa, karena meskipun kami di Jawa, ekonomi masyarakat masih kurang. Jika pun ada handphone, ya dipakai kerja orang tua.” (Kepala Sekolah di Kab. Jepara, Jawa Tengah)

Bagi sekolah, ketersediaan buku teks merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Preferensi dan persepsi positif terhadap ketersediaan buku teks cetak dalam pembelajaran tersebut salah satunya mendorong sebagian besar sekolah yang mendaftarkan IKM (61,4%) telah menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka (Grafik 1). Terkecuali pada sekolah di Papua dan Maluku, sebagian besar sekolah belum menganggarkan pembelian buku yang mana persentasenya mencapai 50% atau lebih.



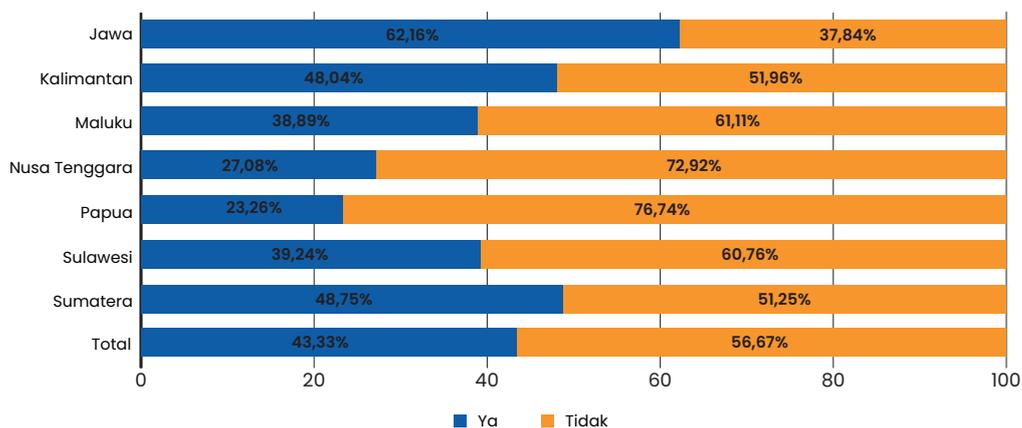
Grafik 1 Status Penganggaran Pembelian Buku Teks Kurikulum Merdeka (n=487)

Simpulan #2: Informasi terkait buku teks Kurikulum Merdeka dan penggunaan dana BOS/BOP untuk pembelian buku teks belum diketahui secara merata.

Dari sekolah yang telah menganggarkan, baru sebagian kecil yang sudah melakukan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka. Sebagian besar lainnya baru akan membeli buku teks Kurikulum Merdeka pada bulan Juli atau sesudahnya. Informasi dan pengetahuan kepala sekolah terkait penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka salah satunya menentukan keputusan sekolah dalam melakukan penganggaran dan pembelian buku. Beberapa sekolah menyatakan informasi mengenai penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka terlambat mereka terima. Analisis dari hasil DKT dan survei menunjukkan masih adanya sekolah yang menganggap bahwa nantinya pemerintah akan menyediakan buku teks yang diberikan langsung kepada sekolah pendaftar IKM, seperti halnya dalam kebijakan perubahan kurikulum di tahun-tahun sebelumnya.

“Informasi mengenai buku Kurikulum Merdeka terlambat sampai ke sekolah, sehingga sekolah saat ini belum menyusun anggaran untuk pembelian buku.” (Kepala Sekolah di Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara)

Meskipun banyak kepala sekolah yang menyatakan telah menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka, sebagian besar dari mereka masih belum mengetahui kebutuhan buku teks yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada awal tahun ajaran baru 2022/2023, utamanya pada kepala sekolah di wilayah Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi, serta dari jenjang PNF, PAUD, dan SD (Grafik 2).



Grafik 2 Pengetahuan mengenai Kebutuhan Buku Teks Kurikulum Merdeka menurut Wilayah (n=487)

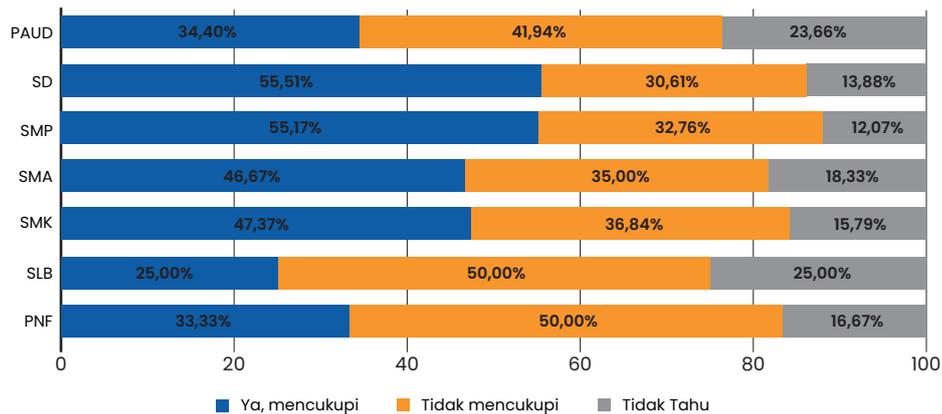
Permasalahan lainnya adalah masih terdapat sekolah yang belum mengetahui bahwa buku teks Kurikulum Merdeka dapat dibeli melalui dana BOS Reguler. Hal ini terjadi terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sementara sebagian besar sekolah lainnya telah mengetahui bahwa buku teks Kurikulum Merdeka dapat dibeli melalui dana BOS Reguler (80,29%) dengan prosedur pembelian dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah/SIPLah (75,96%). Sekolah yang sudah mengetahui kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka umumnya mendapat informasi tersebut dari sosialisasi/bimtek yang diikuti, Platform Merdeka Mengajar, informasi dari sekolah lain, ataupun dari *website* Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (<https://buku.kemdikbud.go.id/>).

Sosialisasi tentang buku teks memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun berdasarkan temuan kajian, hal ini juga dapat dilakukan oleh pihak penerbit. Dari hasil DKT dengan para kepala sekolah terungkap, selama ini penerbit buku juga memiliki andil dalam menyebarkan informasi mengenai buku teks pelajaran kepada sekolah. Sekolah-sekolah sering kali mendapatkan info tentang kebutuhan buku justru dari penerbit yang datang ke sekolah.

“Pemerintah sering terkendala menyosialisasikan programnya di daerah terpencil, sehingga kami (penerbit) juga melakukan sosialisasi ke sekolah. Dua kali dalam sebulan, kami melakukan sapa mitra dan sapa sekolah, misalnya melalui workshop atau webinar terkait isu pendidikan.”
(Perwakilan Penerbit)

Simpulan #3: Dana BOS dianggap belum mencukupi kebutuhan penyediaan buku oleh sebagian sekolah. Di beberapa daerah, sekolah-sekolah juga belum mampu memenuhi rasio kecukupan buku teks untuk siswa.

Para kepala sekolah yang mengetahui pemanfaatan dana BOS untuk penyediaan buku, hampir separuhnya menganggap dana BOS telah cukup untuk memenuhi kebutuhan penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka di sekolah (Grafik 3).



Grafik 3 Ketercukupan Dana BOS untuk Memenuhi Buku Kurikulum Merdeka menurut Jenjang (n=487)

Namun terdapat kepala sekolah di beberapa wilayah seperti Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara, serta dari jenjang PAUD, SLB, dan PNF yang menyatakan dana BOS masih belum mencukupi pemenuhan buku teks Kurikulum Merdeka. Alasan utamanya karena dana BOS merupakan satu-satunya sumber pendanaan yang sekolah miliki sehingga berbagai kebutuhan sekolah akan menjadi komponen yang perlu dibiayai melalui dana BOS tersebut. Pembiayaan lain dianggap lebih urgen, seperti pembayaran honor PTK, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, biaya pemeliharaan sarana prasarana sekolah, serta beberapa pos pembiayaan lain.

Dalam praktiknya, beberapa sekolah yang menyatakan dana BOS cukup, sering kali melakukan pembelian buku secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran, seperti halnya yang dilakukan sekolah dalam pemenuhan buku teks Kurikulum 2013. Selain itu, kenaikan pagu yang cukup signifikan diterima sekolah di beberapa daerah pasca kebijakan BOS Majemuk diterapkan, menyebabkan sekolah lebih leluasa memanfaatkan dana BOS untuk pembelian buku teks pelajaran.

Hasil simulasi terhadap kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka yang dilakukan pada sampel setiap jenjang sekolah di pulau Jawa dan Papua menunjukkan persentase penggunaan dana BOS Reguler untuk pembelian buku teks Kurikulum Merdeka, baik buku siswa maupun buku guru, berada di kisaran 2,18% - 9,59% dari dana BOS yang ada (Tabel 1). Dari simulasi ini, terdapat perbedaan cukup signifikan antara persentase BOS Reguler yang dibelanjakan untuk buku Kurikulum Merdeka di sekolah di wilayah Papua dengan di wilayah Jawa. Persentase dana BOS Reguler yang digunakan untuk pembelian buku teks di Papua lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Hal itu karena berdasarkan Keputusan Kepala BSKAP No. 020/H/P/2022, harga eceran tertinggi (HET) buku teks yang ditetapkan di Papua lebih tinggi dibandingkan di Jawa karena terdampak biaya distribusi yang lebih mahal.

Tabel 1 Simulasi Kebutuhan Buku Teks Kurikulum Merdeka di Setiap Jenjang

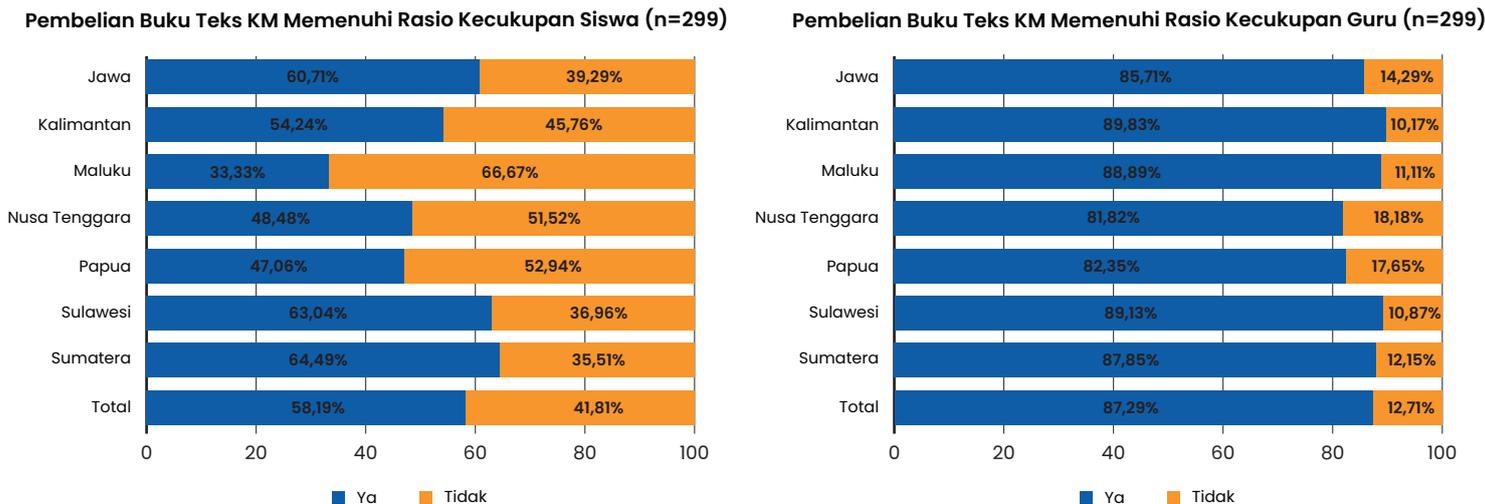
PROVINSI	NAMA SEKOLAH	PAGU BOS 2022	Jumlah Siswa/ kelas	Anggaran Buku Per Siswa	Anggaran Buku Per Guru	Total Anggaran Buku	Persentase terhadap BOS
PAPUA BARAT	SD INPRES 109 PERUMNAS	Rp 724.200.000	111 (kelas 1)	Rp 179.700	Rp 805.400	Rp 23.168.300	8,60%
			127 (kelas 4)	Rp 276.800	Rp 990.800	Rp 39.116.800	
						Rp 62.285.100	
JAWA BARAT	SD NEGERI BOJONGGEDE 07	Rp 642.000.000	96 (kelas 1)	Rp 76.200	Rp 292.800	Rp 8.193.600	3,57%
			116 (kelas 4)	Rp 117.300	Rp 377.300	Rp 14.738.700	
						Rp 22.932.300	
PAPUA BARAT	SMP NEGERI 9 SORONG	Rp 1.292.080.000	349 (kelas 7)	Rp 319.100	Rp 1.135.000	Rp 123.850.900	9,59%
JAWA BARAT	SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN	Rp 2.038.470.000	589 (kelas 7)	Rp 153.700	Rp 427.700	Rp 96.944.800	4,76%
PAPUA BARAT	SMAN 1 WONDAMA	Rp 1.632.150.000	347 (kelas 10)	Rp 352.100	Rp 1.280.700	Rp 134.985.700	8,27%
JAWA BARAT	SMAN 1 SINGAPARNA	Rp 1.932.000.000	439 (kelas 10)	Rp 156.600	Rp 444.200	Rp 74.077.800	3,83%
PAPUA BARAT	SMKN 3 MERAUKE	Rp 2.687.650.000	425 (kelas 10)	Rp 239.500	Rp 1.076.500	Rp 121.164.500	4,51%
JAWA BARAT	SMKN 2 CIKARANG BARAT	Rp 2.707.450.000	524 (kelas 10)	Rp 102.600	Rp 346.200	Rp 58.955.400	2,18%

Keterangan:

Data jumlah siswa diambil berdasarkan Dapodik 2022
 Buku yang dihitung: buku mapel dasar dan buku Pend. Agama dan Budi Pekerti
 Besaran harga buku mengacu pada Keputusan Ka. BSKAP No. 020/H/P/2022
 Penghitungan anggaran untuk guru didasarkan pada jumlah rombel
 Perhitungan buku setiap jenjang
 SD : Kelas I (4 judul buku) dan kelas IV (6 judul buku)
 SMP : Kelas VII (7 judul buku)

"Dana BOS kami naik signifikan dari 200 juta ke 350 juta, untuk kebutuhan buku biasanya menganggarkan sekitar 10 juta." (Kepala Sekolah di Kab. Keerom, Papua).

Ketercukupan jumlah buku yang memenuhi rasio satu buku untuk satu siswa menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi sekolah. Berbeda dengan rasio ketercukupan guru, sebagian sekolah yang menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka belum mampu memenuhi rasio kecukupan buku siswa, seperti di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Grafik 4 dan 5).



Grafik 4 Status Pembelian Buku Teks Kurikulum Merdeka terhadap Rasio Kecukupan Siswa dan Guru (n=299)

Simpulan #4: Potensi permasalahan penggunaan buku teks akibat perubahan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka dari tahun 2021 ke 2022.

Selain berbagai permasalahan di atas, terdapat potensi permasalahan terkait perubahan capaian pembelajaran (CP). Hingga saat ini, buku teks Kurikulum Merdeka yang beredar mengacu pada Capaian Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021 tentang Capaian Pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada Program Sekolah Penggerak. Sejak tahun 2021, Kurikulum Merdeka telah diterapkan di sejumlah satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak. Namun, pada 2022 terdapat perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka sehingga menimbulkan pertanyaan dari sekolah dan dinas pendidikan.

Hasil diskusi dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan, serta analisis data survei menemukan adanya sekolah yang mengkhawatirkan buku yang sudah dibeli pada tahun 2022 akan “mubazir” karena tidak terpakai apabila nantinya di tahun 2023 terjadi revisi buku dan sekolah harus membeli buku edisi terbaru. Kondisi ini terjadi karena terdapat kecenderungan dari sekolah dan dinas pendidikan menyederhanakan implementasi kurikulum berdasarkan buku teks yang tersedia, sehingga perubahan CP dan revisi buku dianggap sebagai masalah besar dalam setiap perubahan kurikulum. Beberapa guru mengaku kebingungan karena di buku teks yang mereka gunakan tidak sesuai dengan acuan CP yang ada, dan pengetahuan mereka tentang perubahan CP belum merata.

“Kami menemukan beberapa materi yang ada di buku tidak sesuai dengan CP 2022, tetapi ada di buku di tingkat kelas yang lain.” (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bogor)

Rekomendasi Kebijakan

1. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi/bimtek tentang IKM dengan memberikan porsi informasi mengenai mekanisme penyediaan buku teks di sekolah secara memadai.

Kurangnya pengetahuan sekolah terkait kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka, serta pemanfaatan dana BOS untuk memenuhi buku teks Kurikulum Merdeka, merupakan dampak dari informasi kebijakan yang belum sepenuhnya efektif. Permasalahan ini perlu diatasi dengan adanya strategi sosialisasi, khususnya mengenai mekanisme penyediaan buku teks melalui berbagai moda dan media, termasuk dalam bimbingan teknis yang dilakukan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka oleh beberapa direktorat teknis menunjukkan bahwa hanya satu direktorat yang memasukkan mekanisme penyediaan buku teks sebagai materi terpisah. Dari materi tersebut, terdapat sekitar 2,85% peserta bimtek yang menyatakan bahwa informasi mengenai penyediaan buku tersebut belum memadai (PSKP, 2022).

Strategi sosialisasi yang dilakukan perlu lebih banyak memberikan porsi pada informasi tentang jenis buku apa saja yang perlu dipenuhi sekolah, mekanisme penyediaan buku teks melalui anggaran BOS/BOP Reguler, dan prosedur pembelian buku teks melalui SIPLah. Dalam hal ini, peran dinas pendidikan juga perlu lebih didorong untuk ikut menyosialisasikan kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka dan HET sesuai SK Kepala BSKAP Nomor 020/H/P/2022 tentang HET kepada sekolah.

2. Memastikan sekolah dapat memenuhi ketercukupan rasio buku teks untuk siswa.

Permasalahan berikutnya terkait dana BOS yang dianggap sebagian sekolah tidak mencukupi kebutuhan penyediaan buku, terutama jika harus memenuhi rasio satu siswa satu buku. Hal ini terjadi karena berbagai kebutuhan sekolah yang dibiayai melalui dana BOS, seperti pembayaran honor PTK, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, biaya pemeliharaan sarana prasarana sekolah, serta beberapa pos pembiayaan lainnya. Permasalahan ini perlu diatasi bersama antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah. Kemendikbudristek perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah bahwa pembelian buku teks melalui dana BOS dapat dilakukan secara bertahap sehingga rasio ketercukupan dapat terpenuhi. Pemerintah daerah melalui dana BOS maupun BOP daerah dapat pula memberikan dukungan untuk sekolah-sekolah yang belum mampu memenuhi kebutuhan buku teks yang diperlukan.

3. Meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan buku teks yang ada dan penyesuaian dengan Capaian Pembelajaran.

Perubahan Capaian Pembelajaran membuat sebagian sekolah khawatir buku yang sudah dibeli pada tahun 2022 akan “mubazir” karena tidak terpakai apabila nantinya di tahun 2023 terjadi revisi buku dan sekolah harus membeli buku edisi terbaru. Hal ini juga terkait erat dengan persepsi sekolah yang memandang perubahan kurikulum sebagai perubahan buku teks. Persepsi sekolah yang memandang keberadaan buku sebagai perangkat utama pembelajaran perlu menjadi target perubahan paradigma yang dibangun melalui Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan perlu lebih menekankan pada pemahaman guru dan kepala sekolah mengenai beberapa prinsip dasar, seperti bahwa buku dengan CP tahun 2021 masih tetap berlaku dan dapat digunakan untuk Kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022/2023, kurikulum tidak disederhanakan hanya sebagai buku teks, dan guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar selain buku teks. Para guru perlu diberikan pemahaman terkait penyesuaian CP dan pemanfaatan buku yang tersedia agar pembelajaran tidak terkendala, meskipun sekolah belum menyediakan buku teks Kurikulum Merdeka.

3. Menyiapkan strategi afirmatif penyediaan buku teks, terutama untuk daerah tertinggal/khusus.

Permasalahan penyediaan buku di daerah yang sulit secara geografis umumnya terjadi karena ongkos ekspedisi yang mahal. Hal ini memerlukan kebijakan khusus. *Pertama*, untuk kebijakan jangka pendek, pemerintah dapat menyediakan buku teks secara langsung ke sekolah untuk menjamin sekolah-sekolah di daerah tertinggal atau daerah khusus dapat memenuhi kebutuhan buku teks yang diperlukan. Kerja sama dengan penerbit sebagaimana dilakukan untuk satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dapat menjadi preseden yang dapat ditiru. Kebijakan ini diperlukan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk penyediaan buku teks yang sulit dilakukan oleh satuan pendidikan di daerah tertinggal atau daerah khusus. *Kedua*, untuk jangka panjang, pemerintah perlu mendorong munculnya penyedia lokal yang dapat memberikan harga wajar/terjangkau, serta pelibatan dinas pendidikan untuk memastikan penyediaan buku bagi sekolah.

Daftar Pustaka

- Afifah, R. (Maret 2013). Pengadaan Buku Kurikulum Baru Cuma Pemborosan. Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2013/03/26/09210352/-Edukasi-News>
- Alexander, P., & Singer, L. (Oktober 2017). Students learn better from books than screens, according to a new study. <https://www.weforum.org/agenda/2017/10/students-learn-better-from-books-than-screens-according-to-a-new-study>
- Altbach, P. G. (1978). Scholarly publishing in the Third World. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/32960542_Scholarly_Publishing_in_the_Third_World
- Fadhilah, U. N. (Oktober 2017). Kemendikbud Akui Sulit Menghadirkan Buku ke Daerah 3T. Republika.co.id. <https://republika.co.id/berita/oyhf2h382/kemendikbud-akui-sulit-menghadirkan-buku-ke-daerah-3t>
- Hayati, I. (November 2014). Alasan Kenapa Kurikulum 2013 Bermasalah. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/623945/alasan-kenapa-kurikulum-2013-bermasalah>
- Jandrić, P., & McLaren, P. (2021). From learning loss to learning opportunity, educational philosophy and theory. Educational Philosophy and Theory. DOI: 10.1080/00131857.2021.2010544
- Janko, T., & Pešková, K. (2017). Exploring Teachers' Perceptions of Curriculum Change and their Use of Textbooks during its Implementation: A Review of Current Research. DOI:10.18452/23097
- Oates, T. (2014). Why textbooks count. *A policy paper, 10*. <https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/181744-why-textbooks-count-tim-oates.pdf>
- PSKP. (2022). Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMP.
- Rachmawan, D. (Desember 2014). Sekolah Bingung Simpan Buku Kurikulum 2013. Tribun-news.com. <https://jambi.tribunnews.com/2014/12/13/sekolah-bingung-simpan-buku-kurikulum-2013>

Strauss, V. (2018). A Nation at Risk' demanded education reform 35 years ago. Here's how it's been bungled ever since. *The Washington Post*, 1-4. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2018/04/26/the-landmark-a-nation-at-risk-called-for-education-reform-35-years-ago-heres-how-it-was-bungled/>

Telaumbanua, Y. (2014). Analisis Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013. *Journal Polingua: Scientific Journal of Linguistics, Literature and Language Education*, 3(1), 86-108.

Wahid, Hasnuddin. (Maret 2021). Standarisasi Buku Pendidikan, Sebuah Keniscayaan. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/12/085230671/standarisasi-buku-pendidikan-sebuah-keniscayaan?page=all>

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah
Imelda Widjaja
Tito Erland Setyadi**